

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator yang menunjukkan bahwa suatu masyarakat telah mencapai kondisi yang baik. Tingkat kesejahteraan ini dapat dinilai dari berbagai aspek, seperti kondisi kesehatan, ekonomi, kebahagiaan, serta kualitas hidup masyarakat (Mulia & Saputra, 2020). Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Tingkat pengeluaran mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah secara umum. Konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, demografi, dan non-ekonomi (Rahim & Saranani, 2024).

Dalam struktur perekonomian, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Peningkatan pendapatan rumah tangga umumnya diikuti oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Pengeluaran konsumsi mencerminkan seluruh belanja rumah tangga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga perubahan pola konsumsi masyarakat akan berdampak langsung terhadap kondisi perekonomian daerah (Fadel, 2024). Tingkat konsumsi rumah tangga pada umumnya menunjukkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, sedangkan rendahnya konsumsi dapat mengindikasikan keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat.

Pengeluaran rumah tangga merupakan seluruh belanja yang dilakukan oleh rumah tangga, individu, maupun lembaga swasta non-profit untuk memperoleh barang dan jasa yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup (Badan Pusat Statistik, 2023). Besarnya pengeluaran tersebut sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok maupun non-pokok. Semakin tinggi pengeluaran rumah tangga, umumnya menunjukkan semakin baik

kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, pengeluaran yang rendah dapat mencerminkan keterbatasan pendapatan dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pengeluaran rumah tangga dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir memiliki karakteristik sosial ekonomi yang berbeda dibandingkan masyarakat non-pesisir. Sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perikanan tangkap (Syafira et al., 2024). Ketergantungan terhadap sektor primer tersebut menyebabkan masyarakat pesisir lebih rentan terhadap fluktuasi pendapatan akibat perubahan musim, kondisi cuaca, dan ketersediaan sumber daya ikan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan akses ekonomi turut menjadi faktor yang menyebabkan tingginya kemiskinan di wilayah pesisir.

Provinsi Jawa Barat memiliki 27 kabupaten/kota dengan karakteristik wilayah yang beragam, termasuk di wilayah pesisir yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor perikanan tangkap. Kabupaten Indramayu, Subang, Cirebon, Pangandaran, Garut, dan Sukabumi merupakan wilayah pesisir yang berkontribusi terhadap produksi perikanan tangkap di Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, tingkat kontribusi produksi perikanan tangkap antarwilayah berbeda-beda, yang menunjukkan adanya perbedaan potensi sumber daya dan kemampuan produksi di masing-masing daerah.

Meskipun wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya alam yang besar, kawasan ini masih menghadapi berbagai permasalahan pembangunan, terutama kemiskinan. Berdasarkan data BPS tahun 2021-2024, tingkat kemiskinan di kabupaten pesisir Jawa Barat menunjukkan kondisi yang bervariasi antarwilayah. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa kemiskinan di wilayah pesisir dipengaruhi oleh karakteristik sosial dan ekonomi dan tingkat pembangunan masing-masing daerah. Berikut data jumlah penduduk miskin di kabupaten pesisir Jawa Barat tahun 2021-2024 :



Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Pesisir

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten-Kabupaten Pesisir Jawa Barat menunjukkan kondisi yang bervariasi antarwilayah. Kabupaten Garut dan Cirebon menunjukkan jumlah penduduk miskin terbesar, disusul oleh Kabupaten Indramayu dan Sukabumi. Sementara itu, Kabupaten Subang dan Pangandaran meskipun memiliki jumlah yang lebih rendah, tetap menunjukkan adanya penduduk miskin dalam jumlah yang cukup besar setiap tahunnya. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa kemiskinan di wilayah pesisir tidak bersifat homogen, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik sosial-ekonomi dan kapasitas pembangunan di masing-masing daerah.

Kondisi kemiskinan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh tingginya pertumbuhan penduduk yang belum diimbangi dengan perkembangan sektor ekonomi dan kesempatan kerja. Wilayah dengan jumlah penduduk besar dapat menekan angka kemiskinan apabila didukung oleh perkembangan teknologi, investasi, dan ketersediaan lapangan kerja yang memadai (Abdullah & Astuti, 2023). Sebaliknya, keterbatasan kesempatan kerja akan menurunkan pendapatan masyarakat dan berdampak pada rendahnya konsumsi rumah tangga.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Pesisir Jawa Barat penting untuk diteliti karena tingkat konsumsi masyarakat pesisir umumnya lebih rendah dibandingkan masyarakat di wilayah nonpesisir/perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat pesisir dalam memenuhi kebutuhan

hidup masih terbatas. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingkat kerentanan ekonomi masyarakat pesisir yang sebagian besar bergantung pada sektor perikanan, di mana pendapatannya sangat dipengaruhi oleh cuaca, musim, dan jumlah hasil tangkapan ikan. Berikut merupakan data pengeluaran konsumsi rumah tangga di sebagian wilayah non pesisir Jawa Barat.



Gambar 1. 2 Pengeluaran Konsumsi RT Sebulan Non Pesisir
Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data BPS, pengeluaran konsumsi rumah tangga di sebagian wilayah pesisir Jawa Barat masih lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan atau non pesisir. Enam Kabupaten pesisir yaitu Indramayu, Subang, Cirebon, Pangandaran, Garut, dan Sukabumi, menunjukkan rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga yang relatif rendah. Berikut rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga di wilayah pesisir Jawa Barat :



Gambar 1. 3 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Sebulan
Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar diatas, meskipun pada periode 2021–2024 pengeluaran konsumsi rumah tangga di wilayah pesisir Jawa Barat mengalami peningkatan, nilainya masih berada di bawah rata-rata daerah non-pesisir di Jawa Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat pesisir relatif lebih rendah dibandingkan wilayah non-pesisir. Rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Garut cenderung lebih rendah dibanding kabupaten pesisir lainnya karena tingkat pendapatan masyarakat relatif lebih rendah dan aktivitas ekonomi wilayah pesisirnya belum berkembang sebesar daerah lain seperti Indramayu dan Pangandaran.

Rendahnya pengeluaran konsumsi rumah tangga di wilayah pesisir dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial, salah satu faktor utama adalah nilai produksi perikanan tangkap. Nilai Produksi Perikanan Tangkap merupakan total nilai hasil penangkapan ikan dan sumber daya perairan lainnya yang diperoleh dari kegiatan perikanan tangkap (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2026). Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap pada umumnya akan meningkatkan pendapatan nelayan sehingga berdampak pada meningkatnya konsumsi rumah tangga masyarakat pesisir.



Gambar 1. 4 Nilai Produksi Perikanan Tangkap
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan RI

Dari gambar diatas, nilai produksi perikanan tangkap daerah pesisir Jawa Barat tahun 2021 sampai 2024. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Indramayu, Subang, dan Cirebon memiliki nilai produksi perikanan tangkap yang relatif tinggi karena berada di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa

Barat yang memiliki potensi sumber daya perikanan laut cukup besar, kondisi gelombang laut lebih tenang, serta di Kabupaten Indramayu terdapat aktivitas nelayan yang tinggi. Sedangkan Kabupaten Pangandaran, Garut, dan Sukabumi berada di kawasan Pantai Selatan Jawa Barat sehingga nilai produksi perikanan tidak setinggi daerah Pantura karena kondisi gelombang laut selatan lebih besar dan cuaca lebih ekstrem.

Selain nilai produksi perikanan tangkap, jumlah Rumah Tangga Perikanan juga diduga mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga. Menurut BPS (2026), Rumah Tangga Perikanan adalah rumah tangga yang melakukan usaha perikanan tangkap dengan tujuan sebagian atau seluruh hasil tangkapannya dipasarkan. Tingginya jumlah rumah tangga perikanan menunjukkan besarnya ketergantungan masyarakat terhadap sektor perikanan. Peningkatan jumlah rumah tangga perikanan dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, apabila jumlah rumah tangga perikanan terlalu besar sementara sumber daya perikanan terbatas, maka persaingan dalam memperoleh hasil tangkapan akan semakin tinggi dan berpotensi menurunkan pendapatan nelayan. Berikut data jumlah rumah tangga perikanan di 6 kabupaten wilayah pesisir Jawa Barat tahun 2021 sampai 2024:



Gambar 1. 5 Jumlah Rumah Tangga Perikanan

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan RI

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan RI setiap kabupaten yang berada di kawasan pesisir Jawa Barat memiliki jumlah Rumah

Tangga Perikanan (RTP) yang berbeda tergantung dengan berbagai faktor yang mempengaruhi di setiap wilayah tersebut. Kabupaten Indramayu dan Cirebon memiliki jumlah rumah tangga perikanan yang relatif cukup tinggi karena berada di kawasan Pantai Utara (Pantura), sedangkan Kabupaten Subang memiliki jumlah rumah tangga paling rendah walaupun di kawasan Pantura karena tidak hanya bertumpu pada sektor perikanan tetapi mengalami transformasi struktur ekonomi menjadi kawasan strategis berbasis logistik, manufaktur, dan ekowisata.

Faktor lain yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan rendahnya penyerapan tenaga kerja sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat. Menurut Harum et al. (2020), Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki dampak terhadap pendapatan dan konsumsi masyarakat. Berdasarkan data tahun 2021-2024, Tingkat Pengangguran Terbuka di enam kabupaten pesisir Jawa Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan tingkat pengangguran tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesempatan kerja yang berpotensi meningkatkan pendapatan dan konsumsi rumah tangga masyarakat.



Gambar 1. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka di 6 Kabupaten pesisir Jawa Barat tahun 2021 sampai 2024. Terlihat bahwa kondisi tingkat pengangguran terbuka seluruh kabupaten mengalami penurunan yang

signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2024. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Cirebon dari tahun 2021 sampai 2024 mengalami penurunan yaitu dari 10,38% menjadi 6,74%. Kabupaten Pangandaran memiliki tingkat pengangguran terbuka yang relatif rendah karena didukung oleh berkembangnya sektor pariwisata dan perikanan yang mampu menyerap tenaga kerja masyarakat. Seperti hotel, restoran, perdagangan, transportasi, dan jasa wisata.

Selain itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) juga berpengaruh terhadap tingkat konsumsi rumah tangga karena berkaitan langsung dengan pendapatan masyarakat. Kenaikan upah akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa sehingga mendorong peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga (Hidayat & Haryatiningsih, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh (Herning Tyas et al., 2021) menyebutkan bahwa upah menjadi tolak ukur masyarakat dalam memenuhi konsumsinya atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin besar pendapatan seseorang dapat membuat pola pengeluaran konsumsi yang cukup baik dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Berikut merupakan data nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota di 6 Kabupaten pesisir Jawa Barat.



Gambar 1. 7 Upah Minimum Kabupaten/Kota

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar

Berdasarkan data diatas bahwa UMK di enam kabupaten pesisir Jawa Barat mengalami peningkatan selama periode 2021-2024, meskipun terdapat perbedaan nilai UMK antarwilayah sesuai kondisi ekonomi dan struktur tenaga kerja masing-masing daerah. Pada tahun 2024 Kabupaten Sukabumi memiliki UMK tertinggi

kemudian disusul Kabupaten Subang, Indramayu, Cirebon, Garut dan terendah Pangandaran. Kondisi tersebut bergantung pada keadaan ekonomi dan struktur tenaga kerja di masing-masing daerah.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan total nilai pengeluaran yang dilakukan rumah tangga untuk membeli barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam periode waktu tertentu, mencakup kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Besarnya pengeluaran tersebut sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok maupun non-pokok. Semakin tinggi pengeluaran rumah tangga, umumnya menunjukkan semakin baik kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga digunakan sebagai variabel dependen karena variabel ini mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kemampuan daya beli masyarakat pesisir.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga masyarakat pesisir dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti nilai produksi perikanan tangkap, jumlah rumah tangga perikanan, tingkat pengangguran terbuka, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Meskipun berbagai penelitian telah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga maupun kesejahteraan masyarakat, penelitian yang secara khusus menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga pada wilayah pesisir di Provinsi Jawa Barat masih relatif terbatas. Selain itu, karakteristik wilayah pesisir yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor perikanan menyebabkan pola konsumsi rumah tangga masyarakatnya berbeda dibandingkan wilayah non-pesisir. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh nilai produksi perikanan tangkap, jumlah rumah tangga perikanan, tingkat pengangguran terbuka, dan UMK terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di wilayah pesisir Provinsi Jawa Barat tahun 2021–2024.

Selain itu, terdapat perbedaan tingkat produksi perikanan tangkap yang cukup mencolok antar kabupaten. Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Subang dikenal sebagai wilayah dengan produksi relatif tinggi karena

berada di kawasan pantai utara, sedangkan Kabupaten Sukabumi, Garut, dan Pangandaran berada pada kategori produksi rendah dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi karena berada di wilayah Pantai Selatan Jawa Barat. Perbedaan ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena mencerminkan adanya ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan antar wilayah (Suryana et al., 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Pesisir di Jawa Barat dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap yang besar serta menjadi wilayah yang sebagian masyarakatnya bergantung pada sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama. Selain itu, setiap kabupaten pesisir memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, seperti wilayah Pantura yang didominasi aktivitas perikanan dan perdagangan, serta wilayah pesisir selatan yang dipengaruhi kondisi Samudra Hindia dan sektor pariwisata. Namun, meskipun memiliki potensi ekonomi pesisir yang cukup besar, tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir Jawa Barat masih relatif rendah dibandingkan wilayah nonpesisir. Rendahnya pengeluaran konsumsi rumah tangga di kawasan pesisir Jawa Barat menjadi salah satu indikator yang mencerminkan masih terbatasnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga di kabupaten kawasan pesisir Jawa Barat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Nilai Produksi Perikanan Tangkap, Jumlah Rumah Tangga Perikanan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Variabel tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga di beberapa kabupaten pesisir Jawa Barat. Berikut merupakan rumusan masalah untuk menjawab permasalahan yang terjadi :

1. Bagaimana pengaruh Nilai Produksi Perikanan Tangkap terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Pesisir Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh jumlah Rumah Tangga Perikanan terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Pesisir Jawa Barat?

3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Pesisir Jawa Barat?
4. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Pesisir Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh nilai produksi perikanan tangkap, jumlah rumah tangga perikanan, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum kabupaten/kota, terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga.

1. Menganalisis pengaruh Nilai Produksi Perikanan Tangkap terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Pesisir Jawa Barat
2. Menganalisis pengaruh jumlah Rumah Tangga Perikanan terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Pesisir Jawa Barat
3. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Pesisir Jawa Barat
4. Menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Pesisir Jawa Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi beberapa pihak yaitu :

1. Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan, terutama dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka, meningkatkan pendapatan melalui upah minimum kabupaten/kota, mengoptimalkan nilai produksi perikanan tangkap, serta mengelola jumlah rumah tangga perikanan secara seimbang dengan ketersediaan sumber daya, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Jawa Barat.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menyediakan informasi penting tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga pelaku sektor perikanan di kawasan pesisir khususnya dapat lebih memahami kondisi ekonomi yang sedang dihadapi, serta termotivasi untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan dan konsumsi rumah tangga.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dan wawasan penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan keterampilan analisis dan penerapan teori dalam penelitian ilmiah, yang diharapkan bisa menjadi landasan akademis dan profesional di kemudian hari.

1.5 Sistematika Bab

Adapun dalam penulisan skripsi terdapat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang penelitian yang menguraikan alasan pemilihan topik, rumusan permasalahan, tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika penulisan sebagai gambaran umum mengenai isi skripsi secara keseluruhan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, mengkaji hasil penelitian sebelumnya, serta menyusun kerangka pemikiran dan hipotesis yang menjadi dasar dalam melakukan analisis penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan pendekatan dan desain penelitian, variabel-variabel yang dipakai, serta teknik pengumpulan data, beserta metode analisis data yang diterapkan guna menjawab permasalahan penelitian.

4. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menyajikan hasil analisis data yang telah diolah, disertai dengan, pembahasan hasil penelitian terhadap temuan hasil penelitian dengan rujukan-rujukan yang relevan.

5. **BAB V PENUTUP**

Bagian penutup, yang mencakup simpulan serta saran-saran terkait hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait dan sebagai referensi untuk penelitian di masa mendatang.

